

TAJUK RENCANA

Penyesalan Tapera

AKSI penolakan pekerja terhadap rencana pemberlakuan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mulai tahun 2024 ini, terus bermunculan di berbagai daerah. Dalam kondisi perkonomian saat ini dan kondisi banyak perusahaan yang nyaris kolap, bahkan sudah kolap, pemberlakuan Tapera akan sangat memberatkan bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Menanggapi semakin tingginya gelombang penolakan terhadap Program Tapera, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku menyesal. Ia pun mengaku legawa jika pelaksanaan program tersebut diundur mulai Mei 2027. Namun dengan catatan, pengunduran Program Tapera disampaikan oleh DPR. Hal itu mengingat Program Tapera sekadar melaksanakan Undang-Undang tentang Program Tapera yang dikeluarkan tahun 2016.

Saat ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang terbit 20 Mei 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Dalam PP 21/2024 antara lain disebutkan, pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan peserta, yakni pemilikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah.

Dalam PP tersebut antara lain diatur bahwa, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Pekerja dimaksud terdiri dari PNS, pegawai ASN, prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja/buruh BUMN, pekerja/buruh BUMD, pekerja/buruh swasta.

Juga diatur, besaran simpanan peserta sebesar 3 persen dari gaji atau upah pekerja. Dari besaran 3 persen tersebut, 2,5 persen dibayar oleh pekerja dan 0,5 persen dibayar oleh pemberi

kerja.

Terkait gejala di kalangan pekerja dan temuan BPK tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna juga telah menyatakan pemerintah tidak akan tergesa-gesa menerapkan pungutan Tapera. Bahkan pihaknya juga belum dapat memastikan bahwa pemungutan dana Tapera akan dimulai 2027.

Mengingat banyaknya masalah program pengumpulan dana dan penanganan perumahan yang sampai saat ini belum terselesaikan, tentunya pernyataan Basuki Hadi Muljono maupun Herry Trisaputra tersebut memang harus dilakukan. Bahkan tidak hanya menyesali dan menunda pemberlakuan Program Tapera, tetapi meniadakan program tersebut.

Rencana pemberlakuan Program Tapera mulai Mei 2024 tidak hanya langsung disambut gelombang penolakan, khususnya dari kalangan pekerja tetapi juga memunculkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahwa sampai akhir 2023 ada 124.960 pensiunan PNS belum menerima pengembalian dana Tapera, jumlahnya mencapai sekitar Rp 567,5 miliar.

Saat ini juga banyak muncul pertanyaan terkait Program Tapera. Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 muncul setelah ada penetapan hasil Pemilu Presiden 2024? Kalau penundaan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dengan dalih masih terdampak pandemi Covid-19, mestinya pemberlakuan PP 21/2024 juga harus ditunda.

Mengingat Program Tapera akan sangat memberatkan pekerja maupun pemberi kerja, tentunya sangat bijak kalau program tersebut ditunda, bahkan ditiadakan. Apalagi saat ini pekerja dan pemberi kerja sedang dalam kondisi sulit dan dilematis. □-d

Starlink dan Ancaman Ketahanan Informasi Nasional

Mahendra Bhirawa

KETAHANAN informasi masyarakat merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Di era digital ini, akses terhadap informasi yang cepat dan andal menjadi kebutuhan dasar. Salah satu inovasi teknologi yang dapat berperan dalam meningkatkan akses internet adalah Starlink, proyek konstelasi satelit dari SpaceX. Namun, adopsi teknologi ini tidak tanpa risiko.

Starlink adalah proyek ambisius dari SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, yang bertujuan menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah melalui jaringan satelit yang mengorbit bumi. Elon Musk memiliki visi untuk mendominasi peta satelit dunia dengan meluncurkan ribuan satelit ke orbit rendah bumi. Tujuan ambisius ini tidak hanya untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional, tetapi juga untuk mengendalikan jaringan komunikasi global. Dengan dominasi ini, Starlink berpotensi menjadi satu-satunya pilihan bagi banyak pengguna internet di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketahanan informasi mengacu pada kemampuan suatu masyarakat untuk terus menerima, memproses, dan menyebarkan informasi secara efektif dan aman, bahkan di tengah krisis atau gangguan. Ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas, keandalan, dan keamanan informasi. Meski Starlink dapat meningkatkan akses internet, terdapat potensi ancaman terhadap ketahanan informasi jika kontrol atas infrastruktur ini berada di tangan pihak asing.

Salah satu manfaat utama dari Starlink adalah peningkatan akses informasi di daerah-daerah terpencil. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, akses internet masih terbatas dan tidak merata. Namun, mengandalkan Starlink untuk mengatasi masalah ini menimbulkan risiko strategis, karena infrastruktur kritis tersebut dikuasai oleh entitas luar negeri yang tidak berada di bawah regulasi pemerintah Indonesia.

Starlink juga berkontribusi pada redundansi jaringan, memberikan cadangan jika infrastruktur internet darat mengalami gangguan. Namun, ketergantungan pada jaringan satelit asing untuk redundansi ini dapat menjadi pedang bermata dua. Jika terjadi konflik geopolitik atau masalah dengan SpaceX, akses internet di daerah-daerah yang bergantung pada Starlink bisa terganggu.

Salah satu perdebatan yang muncul adalah bahwa Pusat Operasi Jaringan (Network Operations Center/NOC) dari Starlink yang melayani pelanggan di Indonesia saat ini masih didukung dari luar negeri, bukan dari dalam negeri. Situasi ini menghadirkan kerentanan karena pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan dalam bekerja sama dengan Starlink untuk mengatasi isu-isu krusial, seperti upaya pemberantasan



KR-JOKO SANTOSO

perjudian online dan penyebaran konten pornografi. Jika NOC Starlink dapat berlokasi di Indonesia, pemerintah akan memiliki kemudahan dalam pengawasan dan koordinasi dengan perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa layanan ini tidak dimanfaatkan secara negatif dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku di dalam negeri.

Starlink menggunakan enkripsi kuat untuk melindungi data yang dikirimkan melalui satelitnya, mengurangi risiko penyadapan atau serangan siber. Namun, ada kekhawatiran data yang melewati infrastruktur yang dikendalikan oleh perusahaan asing mungkin rentan terhadap pengawasan atau penyalahgunaan. Keamanan informasi yang seharusnya menjadi prioritas nasional dapat terancam jika data sensitif dikendalikan oleh entitas luar.

Internet berkecepatan tinggi yang disediakan oleh Starlink memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan efisien. Namun, dalam situasi darurat, ketergantungan pada satu penyedia layanan asing dapat menimbulkan risiko besar. Misalnya, jika layanan Starlink terputus karena alasan politik atau teknis, penyebaran

informasi penting bisa terhambat.

Akses internet yang lebih baik dapat memberdayakan masyarakat dengan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan akses pendidikan. Namun, jika infrastruktur ini dimonopoli entitas asing, Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam mengendalikan biaya layanan dan memastikan keuntungan ekonomi tersebut tetap berada di dalam negeri. Studi yang dilakukan oleh Institut Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) pada 2020 menunjukkan, dominasi asing dalam infrastruktur digital dapat mengarah pada pengurangan sumber daya ekonomi dan penurunan kedaulatan digital.

Ketergantungan pada satu penyedia layanan seperti Starlink menimbulkan risiko signifikan terhadap kedaulatan digital Indonesia. Dengan kontrol yang berada di tangan SpaceX, Indonesia berisiko kehilangan kendali atas infrastruktur digital vitalnya. Ini termasuk risiko data warga negara Indonesia mungkin tidak sepenuhnya aman dari akses pihak asing. Aspek ini berkaitan erat dengan aspek gatra dalam ketahanan nasional, khususnya gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan, di mana kontrol atas informasi dan komunikasi sangat penting.

Untuk memitigasi risiko ini, penting adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia harus menetapkan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa operasi Starlink di Indonesia tetap dalam kendali nasional. Kebijakan ini harus mencakup persyaratan untuk penyimpanan data lokal dan perlindungan privasi yang ketat. Selain itu, penting untuk mendiversifikasi penyedia layanan internet untuk mengurangi ketergantungan pada satu entitas. □-d

*) **Mahendra Bhirawa SE MSc**, Peneliti Ketahanan Nasional UGM (Program Doktorat & Magister Ketahanan Nasional - Sekolah Pascasarjana UGM).

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) .. Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Darurat Kesehatan Mental Mahasiswa

Lolita

DATA terbaru World Health Organization (WHO) melaporkan, sekitar 300 orang di dunia telah mengalami depresi, 5,2% berasal dari Indonesia. Dari jumlah tersebut didominasi mahasiswa. Maka ada yang menyebut, saat ini sudah darurat kesehatan mental mahasiswa, seperti mudahnya memilih jalan pintas, jalan sesat dengan melakukan tindakan bunuh diri. Beberapa kali kita baca di media, mahasiswa melakukan percobaan bunuh diri, sampai kasus bunuh diri di kota pendidikan ini.

Harus diakui, dalam perjalanan menempuh studinya, mahasiswa melewati beberapa permasalahan mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan ini ditandai perasaan tidak nyaman atau ketegangan selama masa studi. Ini sering diabaikan, padahal kecemasan berdampak negatif yang mempengaruhi kemampuan belajar, mengganggu performance akademik hingga putus kuliah.

Salah satu faktor utama pemicu gangguan kesehatan mental pada mahasiswa kesehatan yaitu tekanan akademik yang tinggi. Jadwal kuliah dan praktikum yang padat, tugas yang menumpuk, serta berbagai tahap ujian teori praktek. Standar kompetensi yang tinggi baik dalam sikap, pengetahuan maupun keterampilan praktis mengakibatkan tuntutan yang tinggi untuk mempertahankan prestasi.

Gangguan kesehatan mental pada mahasiswa kesehatan dapat berdampak negatif pada kinerja akademik dan kehidupan pribadi. Sebagai contoh stress berlebihan pada mahasiswa kesehatan juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar, berkonsentrasi, dan memproses informasi dengan baik. Stress yang berkelanjutan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik mereka, seperti peningkatan risiko gangguan tidur, gang-

guan pencernaan, atau gangguan kesehatan lainnya. Peningkatan stress yang dialami oleh mahasiswa kesehatan juga dapat menyebabkan peningkatan iritabilitas. Mahasiswa menjadi mudah tersinggung, mudah marah, atau sulit untuk mengendalikan emosi. Iritabilitas dapat memengaruhi hubungan interpersonal mereka dengan teman, keluarga, atau teman-teman mahasiswa lainnya. Dampak dari iritabilitas dapat menyebabkan mahasiswa menjadi kurang sabar dalam menghadapi tugas-tugas atau tantangan akademik, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

Dalam mengelola gangguan kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa kesehatan, penting bagi mereka untuk memiliki strategi 'koping' yang efektif, seperti manajemen waktu yang baik, dukungan sosial yang kuat, perawatan diri yang baik, dan kemampuan untuk mencari bantuan jika diperlukan. Disamping itu, melakukan banyak aktivitas pribadi menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi gangguan kesehatan mental pada mahasiswa.

Deteksi Dini Kesehatan Mental
Salah satu caranya dengan mengembangkan hobi, latihan meditasi, memanfaatkan teknik relaksasi, dan manajemen stress. Melukis, menggambar, menulis, atau membuat musik dapat menjadi cara efektif untuk mengekspresikan dan mengelola emosi. Aktivitas seni ekspresif ini dapat membantu mahasiswa kesehatan mengalihkan perha-

tian dari pikiran yang negatif dan merasa lebih tenang dan terhubung dengan diri mereka sendiri.

Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam-dalam, dan relaksasi progresif otot dapat membantu meredakan kecemasan dan stress. Mahasiswa kesehatan dapat mencoba berbagai teknik relaksasi dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu juga, institusi pendidikan juga wajib menyediakan sumber daya dan dukungan yang tepat, seperti layanan kesehatan mental, pelatihan keterampilan manajemen stress, dan program mentoring.

Upaya deteksi dini dan penanganan gangguan kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman dan sehat. □-d

*) **Apt Lolita MSc PhD, Kaprodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD).**

Pojok KR

Pimpinan Muhammadiyah memutuskan menarik seluruh dananya di Bank Syariah Indonesia.

- Jangan tarik-tarikan. ***

Rencana pemberlakuan Program Tabungan Perumahan Rakyat menuai bayak penolakan.

- Batalkan saja? ***

Kadipaten Pakualaman merupakan bagian penting dari sejarah Keistimewaan DIY.

- Jelas dan pasti.

Berabe